

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 1971 berjumlah 114,8 juta.<sup>1</sup> Jumlah penduduk dengan kepadatan yang tinggi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Dampak positif dari banyaknya jumlah penduduk adalah melimpahnya sumber daya manusia untuk membangun negara. Dampak negatif dari banyaknya jumlah penduduk antara lain melonjaknya angka pengangguran jika tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang bertambah. Selain itu, dampak negatif dari jumlah penduduk yang banyak akan menimbulkan masalah lain seperti permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial. Sensus diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah.

Sensus Penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain: ciri-ciri demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Sensus penduduk diadakan pada tahun 1971 untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang tinggal di Indonesia dan menjadi acuan dalam pembuatan program pembangunan nasional. Sensus Penduduk bertujuan untuk mencacah jumlah penduduk yang ada di suatu

---

<sup>1</sup> Biro Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 1971 Republik Indonesia*. (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1972), hlm. 13

<sup>2</sup> Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8

negara, yang berarti pada hari pelaksanaan sensus, petugas sensus datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk mencacah (menghitung) seluruh anggota rumah yang ada.<sup>3</sup>

Pertumbuhan penduduk di Jakarta pada tahun 1967 hingga 1970 naik 5,2%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat pemerintah daerah melakukan suatu upaya untuk menanggulangi jumlah pertumbuhan penduduk.<sup>4</sup> Penyebab dari pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh kelahiran (fertilitas<sup>5</sup>) yang tinggi. Selain itu, penyebab lain dari pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh arus Urbanisasi yang masuk ke Jakarta dari tahun 1959. Setiap tahun, sekitar 100.000 orang pendatang dengan angka 60.000 dari Jawa Barat, 30.000 Jawa Tengah, dan sisanya dari luar Pulau Jawa.<sup>6</sup>

Pemerintah melihat jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat membuat stabilitas ekonomi, politik dan keamanan terganggu. Akibat dari jumlah penduduk yang tak terkendali, dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kriminalitas akibat ketimpangan dan kesenjangan sosial yang tinggi. Pengangguran terjadi karena penduduk usia produktif tidak dapat bekerja

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>4</sup> Edi Sedyawati, dkk. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986), hlm. 29

<sup>5</sup> Fertilitas merupakan istilah dalam demografi yang mempunyai arti kelahiran bayi di suatu wilayah. Fertilitas menjadi salah satu indikator dalam menentukan angka pertumbuhan penduduk.

<sup>6</sup> Edi Sedyawati, dkk, *op.cit*, hlm. 30

karena kurangnya lapangan pekerjaan. Jika usia produktif tidak dapat bekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan, maka dapat muncul permasalahan ekonomi.

Selain itu, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, pemerintah melakukan kegiatan penanggulangan jumlah pertumbuhan penduduk. Tujuan utama dari pemerintah adalah berusaha mengatur jumlah kepadatan penduduk untuk membuat stabilitas negara dalam ruang lingkup ekonomi, politik dan keamanan dapat terkendali. Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan.<sup>7</sup> Dalam menyelenggarakan KB di Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan membentuk BKKBN Provinsi DKI Jakarta yang di dalam struktur organisasi tersebut terdapat BKKBN kota Jakarta Timur.

Atas nama pembangunan, negara berkepentingan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Masyarakat (bangsa, negara) dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonominya tinggi.<sup>8</sup> Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (pembangunan) tidak akan mempunyai makna dan fungsi jika populasi tidak terkendali. Mempunyai arti yang lebih luas, sejauh apa pun kemakmuran, kekayaan sebagai hasil pembangunan, melimpahnya sumber daya

---

<sup>7</sup> Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1981), hlm. 26

<sup>8</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 2.

alam (SDA), tidak akan ada artinya jika harus menanggung beban populasi yang tinggi.<sup>9</sup>

Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata dapat mengakibatkan dampak yang ditimbulkan antara lain adalah masyarakat yang tidak sejahtera. Salah satu dampak mikro dari masyarakat yang tidak sejahtera adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu dibuat suatu program pembangunan dalam konteks keluarga, yaitu pembangunan kesejahteraan keluarga yang menjadi landasan program KB.<sup>10</sup> Kesejahteraan keluarga tidak akan tercapai jika dalam unit masyarakat terkecil yaitu keluarga memiliki permasalahan yang rumit. Maka dari itu dengan jumlah anak yang ideal akan membuat keluarga dapat mengatur kondisi di dalam lingkungannya sendiri.

Sebelum program KB diresmikan pemerintah, pada tahun 1952 KB diperkenalkan terlebih dahulu oleh sekelompok orang terkemuka di beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.<sup>11</sup> Peran masyarakat untuk mensosialisasikan penanggulangan angka kelahiran yang tinggi mendapatkan hasil. Pada tanggal 12 November 1952, di Yogyakarta didirikan yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan

---

<sup>9</sup> Paul R. Ehrlich, *Ledakan Penduduk*, terj. oleh Inyo Fernandes dan Paul Soge, cet. 4, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981), hlm. vii.

<sup>10</sup> Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968 mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun I, hlm. 1

<sup>11</sup> BKKBN, *Informasi Dasar Kependudukan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1982), hlm. 9

berusaha menciptakan keluarga sejahtera. Untuk menyatukan gerak para tokoh pemerhati KB, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) resmi berdiri pada tahun 1957.<sup>12</sup> Dalam kegiatannya, PKBI ditunjang oleh Departemen Kesehatan yang menyediakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) serta tenaga kesehatan sebagai sarana pelayanan KB.<sup>13</sup>

Tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia. Setahun berikutnya, Pemerintah melihat situasi PKBI berhasil mengambil simpati masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru sebelum membentuk BKKBN dibuat suatu tim untuk menyebarluaskan program KB ke masyarakat yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tanggal 17 Oktober 1968 yang kemudian pada 2 tahun berikutnya Pemerintah berinisiasi meresmikan badan non Departemen yang berada di bawah pengawasan Presiden langsung melalui pendirian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang biasa disingkat BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 dan mengangkat dr. Suwardjo Suryaningrat sebagai kepala BKKBN.<sup>14</sup> Pemerintah mengambil suatu langkah antisipasi untuk menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>13</sup> Indan Encang, *Pendidikan Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 22

<sup>14</sup> BKKBN, "*Sejarah BKKBN*". Diakses dari <https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn> pada tanggal 30 Agustus 2019.

dengan membentuk sebuah badan yang secara spesifik dan khusus bertanggung jawab terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.<sup>15</sup>

Pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki tujuan merealisasikan kesejahteraan umum. Salah satu cara dalam merealisasikan kesejahteraan umum adalah dengan mengatasi masalah kependudukan. Hal ini tertuang di Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengatakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah kependudukan adalah menyukseskan Program Keluarga Berencana.<sup>16</sup> Selain itu, program KB juga didukung dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978.<sup>17</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan 3 kegiatan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan, dan pelembagaan-pembudayaan. Perluasan jangkauan mempunyai arti mengajak peserta KB baru sebanyak-banyaknya di wilayah Jakarta Timur, mengembangkan lembaga baru yang dikemudian hari dapat diharapkan dapat membantu program KB. Hal ini akan semakin dapat dikembangkan dengan pembinaan.

Pembinaan yang dimaksud mempunyai arti lebih menyempurnakan penerimaan konsep program KB secara lestari, baik dalam keikutsertaan sebagai

---

<sup>15</sup> BKKBN. *Informasi Dasar Gerakan KB Pembangunan Keluarga Sejahtera*. (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1996), hlm. 22.

<sup>16</sup> Majalah Keluarga Berencana. *Keluarga Berencana Dalam Pers.* (Jakarta: BKKBN, 1977), hlm. 21

<sup>17</sup> BKKBN. *Informasi Dasar Program Kependudukan Keluarga Berencana*. (Jakarta: PT Rais Utama Offset. 1982), hlm. 21

akseptor KB, maupun dalam pengelolaan program KB di lingkungan masyarakat Jakarta Timur. Setelah pembinaan dapat dilakukan, maka kegiatan selanjutnya pelebagaan-pembudayaan. Kegiatan pelebagaan-pembudayaan mempunyai arti usaha untuk meningkatkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang membudaya.<sup>18</sup> Lingkungan di Jakarta Timur masuk ke dalam rencana pelebagaan pemberdayaan keluarga yang sehat.

Kegiatan pelebagaan kebudayaan termasuk usaha meningkatkan peran masyarakat Jakarta Timur dan aparat pemerintah daerah kota Jakarta Timur dalam berperan serta mengelola program KB secara kuat. Maka dari itu dalam usaha pelebagaan didirikan lembaga yang berwenang dan mengatur program KB yang akan disosialisasikan ke seluruh wilayah Jakarta Timur, yaitu BKKBN kota. Realisasi dari pelaksanaan BKKBN kota memungkinkan adanya peran dan keterlibatan berbagai pihak. Dalam tugas sosialisasi, BKKBN kota banyak melibatkan tokoh masyarakat dan pemerhati KB, sedangkan dalam pelayanan kontrasepsi, BKKBN kota bekerja sama dengan suku dinas Kesehatan yang dalam hal ini menempatkan bidan sebagai tenaga kesehatan profesional.<sup>19</sup>

Kantor BKKBN kota Jakarta Timur berdiri sebagai bentuk realisasi program KB di tingkat kota. Dengan mengandalkan slogan “Dua Anak Cukup”, Program

---

<sup>18</sup> Indan Encang, *op. cit*, hlm. 24

<sup>19</sup> BKKBN. *Sekilas Informasi Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana*. (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2009), hlm. 25.

KB dilakukan di kota tersebut dengan cara melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah (dalam hal ini kecamatan) di Jakarta Timur yang pada tahun 1973 yang luas wilayahnya 184,01 km<sup>2</sup> lebih luas dibanding wilayah administratif Jakarta lainnya.<sup>20</sup> Sosialisasi KB di wilayah Jakarta Timur mencakup pemberdayaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai KB dan Pemberdayaan Keluarga. Peran lembaga masyarakat dalam mensosialisasikan KB membuat peluang keberhasilan program KB menjadi lebih besar.

Luas wilayah kota Jakarta Timur yang lebih besar dibanding wilayah kota Jakarta lainnya membuat PLKB berusaha lebih keras dalam melembagakan KB di masyarakat. Kecamatan di Jakarta Timur pada tahun 1973 ada Jatinegara, Matraman, Pulo Gadung, Pasar Rebo dan Keramat Jati. Tahun 1975 terdapat penambahan kecamatan di Jakarta Timur yaitu Cakung. Wilayah kota Jakarta Timur yang luas menjadi tantangan pemerintah daerah kota Jakarta Timur dalam merealisasikan KB ke masyarakat. Maka dari itu terdapat hubungan kerja sama antara pemerintah kota Jakarta Timur dan BKKBN kota Jakarta Timur dalam melembagakan KB ke masyarakat. BKKBN kota Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan KB kepada Walikota Jakarta Timur hingga di tingkat kelurahan.

Karakteristik masyarakat di Jakarta Timur yang berpegang teguh kepada agama dan tokoh adat (dalam hal ini tokoh adat Betawi) mendapatkan reaksi

---

<sup>20</sup> Edi Sedyawati, dkk, *op. cit*, hlm. 22



yang beragam akibat munculnya KB. Reaksi positif dari masyarakat beranggapan bahwa KB merupakan solusi dari permasalahan keluarga yang tidak sejahtera serta KB dapat membantu terdidiknya anak dengan baik karena jumlah anak dalam program KB adalah dua sehingga orang tua dapat membentuk karakter anak yang baik dan berkualitas. Reaksi negatif masyarakat Jakarta Timur terhadap KB adalah menganggap bahwa KB hanyalah alat untuk melakukan pembatasan kelahiran yang berarti membatasi hak setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi yang baik dari BKKBN kota melalui PLKB dalam melembagakan KB agar masyarakat dapat menerima KB dan meningkatkan peluang keberhasilan KB di Jakarta Timur.

Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melembagakan KB ke masyarakat adalah penurunan persentase kenaikan jumlah penduduk dari satu tahun ke tahun berikutnya. Selain itu, peningkatan jumlah akseptor KB masuk ke dalam indikator keberhasilan program KB. Peningkatan akseptor KB tidak lepas dari peran penting PLKB dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya KB. Edukasi yang dilakukan PLKB termasuk ke dalam program pemberdayaan KIE KB yang dilakukan di klinik, pos KB maupun paguyuban KB yang tersebar di kecamatan.

Klinik KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam penambahan jumlah. Pada tahun 1974 klinik KB berjumlah 28. Sepuluh tahun kemudian,

jumlah klinik KB di kecamatan kota Jakarta Timur meningkat hingga 65.<sup>21</sup> Peningkatan tersebut tidak lepas dari antusias masyarakat dalam mengetahui KB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana di Jakarta Timur tahun 1973-1984?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Jakarta Timur tahun 1973-1984

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis penelitian ini sebagai kajian tentang kesejahteraan sosial dan keluarga di bidang Ilmu Sejarah khususnya tentang Keluarga Berencana dan program KB di Jakarta Timur tahun 1973-1984. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses pelaksanaan program KB di Jakarta Timur pada masa perkembangannya hingga menjadi sebuah alat yang diminati masyarakat yang dalam prosesnya ada kendala. Lalu penelitian ini untuk memenuhi syarat kelulusan program Sarjana yang diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Skripsi.

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, “*Sensus Penduduk Jakarta Timur 1985*”, hlm. 107

Manfaat penelitian praktis di antaranya adalah untuk menambah khazanah Historiografi mengenai sejarah sosial khususnya terkait demografi dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan karya tulis ilmiah selanjutnya yang sesuai dengan judul penelitian ini maupun dengan tema lain yang tidak jauh berbeda dengan tema penelitian ini serta memberikan pengalaman bagi masyarakat dan salah satu penyumbang Ilmu Pengetahuan.

### **1.5 Batasan dan Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan sebuah batasan yang mengatur temporal tahun dan spasial ruang agar suatu penelitian dapat fokus ke satu titik dan tidak melebar. Batasan temporal penelitian ini adalah di tahun 1973-1984 di mana pada tahun 1973 melalui pemerintah keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Cc/4/1/1/1973 tanggal 4 Januari 1973 mengenai struktur organisasi BKKBN Provinsi DKI Jakarta yang di bawahnya terdapat organisasi BKKBN kota Jakarta Timur memulai program Keluarga Berencana di wilayah Jakarta Timur.<sup>22</sup> Penelitian ini diakhiri tahun 1984 karena pada tahun tersebut masa peningkatan jumlah akseptor KB di Jakarta Timur yang paling tinggi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Cc/4/1/1/1973 tanggal 4 Januari 1973.

<sup>23</sup> Peningkatan jumlah akseptor pada tahun 1984 meningkat hingga 64.077 akseptor. Jumlah tersebut lebih tinggi dengan selisih 48.506 dibanding pada tahun 1973 dengan jumlah akseptor 15.571. peningkatan jumlah akseptor disebabkan oleh antusiasme masyarakat yang tinggi akibat dari pelebagaan KB oleh BKKBN kota dan PLKB berhasil.

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Jakarta Timur karena Jakarta Timur merupakan kota modern serta luas wilayah Jakarta Timur hingga 184,01 km<sup>2</sup> merupakan wilayah yang terluas dibanding Jakarta lainnya.<sup>24</sup> Luas wilayah yang paling besar di antara kota Jakarta yang lain merupakan suatu bentuk tantangan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menyukseskan program KB sebagai program pembangunan kesejahteraan keluarga. Karakteristik masyarakat Jakarta Timur yang memegang teguh agama dan tokoh adat menjadikan KB mendapat penolakan di masa awal pelaksanaan. Pemerintah daerah berusaha lebih keras dalam melembagakan KB agar diterima di kalangan masyarakat.

Batasan tematik penelitian ini mengenai Sejarah Keluarga Berencana yang mempunyai arti tujuan dari program KB adalah untuk membatasi jumlah angka kelahiran dan menciptakan keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera. Dalam norma keluarga kecil yang sehat, mandiri dan sejahtera merupakan bentuk dari pembangunan negara dalam konteks pembangunan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dan di lingkungan sosial.

### **1.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan suatu gambaran yang menghubungkan antara konsep dengan lainnya untuk menjelaskan setiap permasalahan secara

---

<sup>24</sup> Edi Sedyawati, dkk. *op.cit*, hlm. 22

rinci dalam penelitian. Penelitian ini yang berjudul *Program Keluarga Berencana di Jakarta Timur tahun 1973-1984* termasuk dalam kategori Sejarah Sosial.<sup>25</sup> Pembahasan ini digunakan untuk menyusun analisis secara historis tentang Program KB sebagai bentuk penanggulangan ledakan penduduk dan sebagai bentuk usaha untuk tercapainya tujuan keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan mandiri.

Hartanto mengemukakan bahwa KB merupakan suatu usaha untuk mengatur objek dalam kehamilan seperti menghindari dari kehamilan tertentu, mengatur kehamilan tertentu, mengatur interval kehamilan dalam waktu yang ditentukan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.<sup>26</sup> Pengertian KB menurut BKKBN adalah suatu upaya untuk mencapai keluarga yang berkualitas dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui kesehatan reproduksi yang di dalam usaha tersebut di dalamnya mencakup menentukan jumlah anak dalam keluarga, mengatur interval waktu kehamilan selanjutnya, dan memperhatikan kesehatan reproduksi.

Penulisan Skripsi ini menggunakan konsep mengenai Kependudukan. Kependudukan mempunyai arti berbagai persoalan yang menyangkut masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Kependudukan mempunyai 2 arti yang lebih

---

<sup>25</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 307

<sup>26</sup> Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 10

luas, yaitu masalah kependudukan kuantitatif dan kualitatif. Kependudukan kuantitatif bermakna data atau statistik kependudukan yang melambung tinggi dan dapat mengganggu stabilitas nasional seperti angka kelahiran yang tinggi, jumlah penduduk yang besar. Kependudukan kualitatif bermakna kualitas dalam ruang lingkup kependudukan yang dinilai dapat menghambat negara dalam mencapai tujuannya dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti contoh tingkat kesehatan, pendidikan dan kemakmuran/kesejahteraan yang rendah.

### 1.7 Tinjauan Pustaka

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi di masa lampau.<sup>27</sup> Tinjauan Pustaka diperlukan untuk memperkuat analisis serta teori yang menjadi dasar dalam menuliskan sejarah. Tinjauan pustaka merupakan kajian dalam bentuk buku, jurnal penelitian untuk mendukung analisis dalam penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup tema yang diteliti seputar sejarah sosial dan Keluarga Berencana.

Tinjauan pustaka digunakan untuk memperbanyak dan memperkaya rujukan dalam menulis penelitian yang berjudul *Program Keluarga Berencana di Jakarta Timur Tahun 1973-1984*. Buku yang mengkaji mengenai program KB ditulis

---

<sup>27</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm. 19.

oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berjudul *Informasi Dasar Kependudukan Keluarga Berencana, Informasi Dasar Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana ditinjau dari Sudut Pandang Agama-agama besar di Dunia, Keluarga Berencana dari sudut pandang Kesehatan Reproduksi, hingga Keluarga Berencana dipandang dari Sudut pandang Islam*. Kelima buku yang disebutkan adalah buku yang mengkaji perkembangan program KB dalam lingkup nasional hingga program KB yang mendapat pandangan tersendiri dari agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu hingga Buddha.

Perkembangan program KB yang mulai dirintis oleh PKBI di tahun 1957 mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Orde Baru sehingga di tahun 1968 dibentuk lembaga KB resmi yang bertugas untuk merencanakan dan melembagakan KB ke masyarakat. Hingga tahun 1970 dibentuk BKKBN untuk mengkoordinasi KB secara nasional untuk dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan KB ke masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda di setiap agama yang mengartikan program KB. Buku *Keluarga Berencana ditinjau dari Sudut Pandang Agama-agama besar di Dunia* menjelaskan dalam sudut pandang agama Islam KB mendapatkan argumentasi yang berbeda-beda. KB menjadi hal yang tidak melanggar agama jika niat baik seorang muslim dalam menggunakan KB tidak menghilangkan nyawa janin dalam kandungan ibu. Upaya lain dalam sudut pandang Islam bahwa KB

merupakan suatu jembatan dalam menciptakan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera menjadi bahasan pokok dalam buku.

Buku *Informasi Dasar Kependudukan Keluarga Berencana* mengkaji mengenai pelaksanaan program KB secara nasional yang menempatkan PLKB di garis terdepan dalam melaksanakan KB ke masyarakat. Buku sejarah yang sudah mengkaji KB membahas KB secara nasional, membuat penulis berusaha untuk menuliskan sejarah KB yang dilaksanakan di Jakarta Timur yang bermula di tahun 1973 ketika Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Gubernur Cc.4/1/1/1973 tentang pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DKI Jakarta yang menjadi permulaan pelaksanaan KB di Jakarta Timur.

### **1.8 Metode dan Sumber**

Dalam menuliskan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang berisi pemilihan topik, pencarian sumber (Heuristik), kritik sumber (verifikasi data), interpretasi data, dan penulisan sejarah (Historiografi).<sup>28</sup> Pemilihan topik dalam penelitian ini telah ditentukan yaitu mengenai program Keluarga Berencana di Jakarta Timur. Alasan memilih topik/permasalahan mengenai Keluarga Berencana di Jakarta Timur adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan program KB yang menjadi program nasional dan

---

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005) hlm. 90



dilaksanakan di Jakarta Timur melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Cc/4/1/1/1973 tanggal 4 Januari 1973.

Pada tahap pengumpulan sumber yang didapat dari buku sebagai sumber sekunder yang terdapat di perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah UNAIR, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UNAIR, perpustakaan kampus B UNAIR, kantor BKKBN Jakarta Timur, perpustakaan kantor Walikota Jakarta Timur, serta perpustakaan di ANRI. Arsip sebagai sumber primer didapat melalui penelusuran di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, arsip kantor KB Jakarta Timur, serta arsip di kantor Walikota Jakarta Timur.

Koran dan majalah merupakan salah satu arsip primer. Koran dan majalah (Harian Kompas tahun 1969, 1971, 1972 & 1973, Jakarta Pos tahun 1970 dan 1971 serta Angkatan Bersenjata tahun 1971, Majalah Dunia Wanita 1970) didapat di Perpustakaan Nasional Jl. Salemba, Jakarta Pusat dan Perpustakaan Nasional Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat Jurnal yang membahas mengenai KB. Terakhir sumber lisan berupa wawancara dengan masyarakat di wilayah Jakarta Timur yang telah menetap dari tahun 1970an, petugas BKKBN kota Jakarta Timur.

Setelah tahap pengumpulan sumber, sumber-sumber yang didapat di kritik terlebih dahulu dalam kritik ekstern dan kritik intern. Dalam kritik ekstern dicari

keabsahan dalam sumber secara menyeluruh. Setelah itu sumber yang didapat dikritik intern yang berupa pengecekan data yang valid sesuai kejadian masa lampau.

Setelah dikritik atau disebut verifikasi sumber, fakta yang di dapat dari sumber dianalisis terlebih dahulu sesuai urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan fakta yang ada di sumber. Analisis sumber (interpretasi) menggunakan perspektif Sejarah yang harus objektif. Setelah disusun menuju tahap akhir, penulisan Sejarah.

Tahap terakhir penulisan sejarah yang biasa disebut Historiografi. Sumber yang sudah didapat, lalu melewati proses kritik sumber baik kritik ekstern dan intern, lalu interpretasi data, selanjutnya disusun secara kronologis dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah atau penelitian yang menggunakan bahasa ilmiah sesuai peraturan akademik.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Penelitian ini dengan judul *Program Keluarga Berencana di Jakarta Timur Tahun 1973-1984* membahas mengenai perkembangan program KB di Jakarta Timur yang dianalisis secara historis. Maka dari itu diperlukan sistematika penulisan secara kronologis agar penelitian ini rapi dalam bentuk:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode dan sumber, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum mengenai ledakan penduduk di Indonesia dan Jakarta Timur, perencanaan program KB nasional mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

Bab III berisi masalah mengenai masalah kependudukan di Jakarta Timur sehingga muncul pemikiran bahwa program Keluarga Berencana merupakan solusi dari masalah tersebut, program KB dari sudut pandang Pemerintah dan dari sudut pandang masyarakat sehingga bisa diterima di kalangan masyarakat. Program Keluarga Berencana di Jakarta Timur dari tahun 1973 mulai dari perencanaan tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota di masa program KB mengalami pelonjakan pengguna KB pada tahun 1984 di masyarakat yang merupakan sasaran program KB.

Program KB melaksanakan kegiatan pelaksanaannya ke masyarakat yang dimulai dari perencanaan, hambatan serta kesuksesan dengan salah satunya diberikan penghargaan-penghargaan di masa pelaksanaan program KB (pemberian Honorarium kepada camat, lurah, dan PLKB di wilayah DKI Jakarta terutama di kota Jakarta Timur). Dalam bab III dijelaskan mengenai struktur

kerja BKKBN yang berisi satuan tugas dari yang tingkat kota hingga satuan petugas pelaksana KB tingkat kelurahan, keterlibatan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah kota Jakarta Timur hingga satuan unit pemerintahan paling kecil seperti kelurahan hingga RT).

Salah satu keterlibatan organisasi lain dalam pelaksanaan KB seperti Dharma Wanita di lingkungan masyarakat yang membantu BKKBN kota, serta menjelaskan indikator apa saja dari program KB sehingga bisa mencapai keberhasilan di masyarakat dan dampak dari program KB di masyarakat serta pengaplikasiannya di kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Bab IV dari penelitian berupa kesimpulan yang berisi pokok permasalahan hingga jawaban dari penelitian ini.